

Pengaruh Belanja Pemerintah dan PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi Kaltim Tahun 2014–2023

Salsabilla Ayu Wardani

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: salsabillaayu.22050@mhs.unesa.ac.id

Prayudi Setiawan Prabowo

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: prayudiprabowo@unesa.ac.id

Abstrak

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur masih menjadi isu penting meskipun perekonomian daerah menunjukkan kecenderungan tumbuh selama periode 2014–2023. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto yang didorong oleh dominasi sektor pertambangan dan migas belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta PDRB terhadap ketimpangan pendapatan pada tingkat kabupaten dan kota. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan tahapan pemilihan model melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah fungsi ekonomi berperan signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, sedangkan belanja pendidikan dan perlindungan sosial berkorelasi positif dengan peningkatan ketimpangan. PDRB juga menunjukkan pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Secara simultan, seluruh variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan efektivitas belanja publik agar kebijakan fiskal daerah mampu mendorong pemerataan kesejahteraan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kata Kunci: Belanja Pemerintah, PDRB, Ketimpangan Pendapatan

JEL: H5, O15, R1

Abstract

Income inequality in East Kalimantan Province remains a relevant issue despite the region's economic expansion during the 2014–2023 period. Growth in Gross Regional Domestic Product, largely driven by mining and oil and gas activities, has not been accompanied by an equal distribution of development outcomes across districts and cities. This study examines the effects of local government expenditure on economic, education, and social protection functions, as well as GRDP, on income inequality at the district and city level. Panel data regression is employed, with model selection conducted using the Chow test, Hausman test, and Lagrange Multiplier test. The results indicate that government expenditure on economic functions significantly reduces income inequality, while education and social protection spending are positively associated with inequality. GRDP also shows a positive relationship

with income inequality. Simultaneously, all independent variables are found to have a significant effect on income inequality. These findings highlight the importance of improving the effectiveness of public spending to promote a more inclusive fiscal policy in East Kalimantan Province.

Keywords: *government expenditure, GRDP, income inequality*

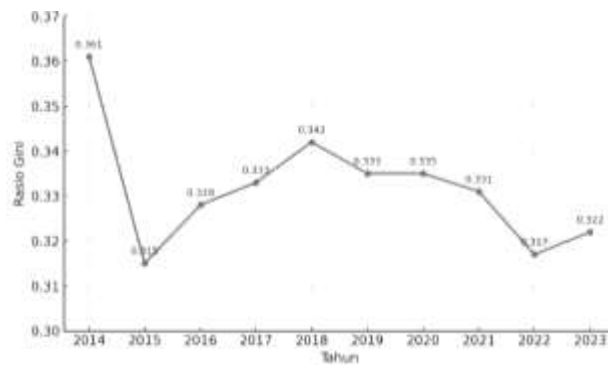
JEL: *H5, O15, R1*

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan di Indonesia menjadi persoalan penting karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti pemerataan (Hermawan & Taher, 2025), sehingga sebagian kecil kelompok masyarakat tetap menikmati porsi kekayaan yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan rendah (World Bank, 2015; Yusuf et al., 2014). Ketimpangan juga tidak merata antarwilayah, terlihat dari adanya provinsi dengan ketimpangan tinggi seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, serta provinsi lain yang mengalami perbaikan kondisi (BPS, 2023). Variasi ini menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi struktur ekonomi, karakteristik demografis, serta efektivitas kebijakan fiskal di masing-masing daerah, sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi dinamika ketimpangan tersebut. Menurut data BPS tahun 2023, bahwa PDB (Produk Domestik Bruto) nasional mencapai Rp20.892,4 triliun dengan PDB per kapita sebesar Rp75 juta, sementara Rasio Gini nasional berada pada angka 0,388 yang menandakan ketimpangan pada level sedang. Menurut Hasan (2022), kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi nasional stabil, pemerataan pendapatan masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan inklusif.

Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang besar menghadapi dinamika ketimpangan yang khas karena struktur ekonominya sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian. Sepanjang 2014 hingga 2023, sektor ini secara konsisten menjadi penyumbang terbesar PDRB, dengan kontribusi sekitar 45,52% pada 2019, menurun menjadi 41,43% pada 2020 akibat pandemi, lalu meningkat kembali menjadi 45,05% pada 2021 dan melonjak hingga 53,24% atau sekitar Rp490,5 triliun pada 2022. Dominasi sektor padat modal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak sepenuhnya diikuti pemerataan pendapatan sehingga distribusi kesejahteraan masyarakat berpotensi tertinggal (Sukirno, 2016). Kondisi ini sejalan dengan teori sektor ganda (Arthur Lewis) dan hipotesis Simon Kuznets yang menjelaskan bahwa pertumbuhan awal yang didominasi sektor modern dapat memperlebar ketimpangan (Kuznets, 1955; Mankiw, 2012). Perbedaan ketimpangan juga tampak antardaerah, terutama melalui perbedaan PDRB per kapita kabupaten dan kota. Selain itu, Rasio Gini 2023 menunjukkan adanya ketimpangan lebih tinggi di wilayah perkotaan sebesar 0,328 dibandingkan wilayah perdesaan sebesar 0,292, yang menegaskan bahwa distribusi pengeluaran di Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan signifikan.

Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Kalimantan Timur periode 2014–2023 menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dengan kecenderungan menurun pada tahun-tahun terakhir.



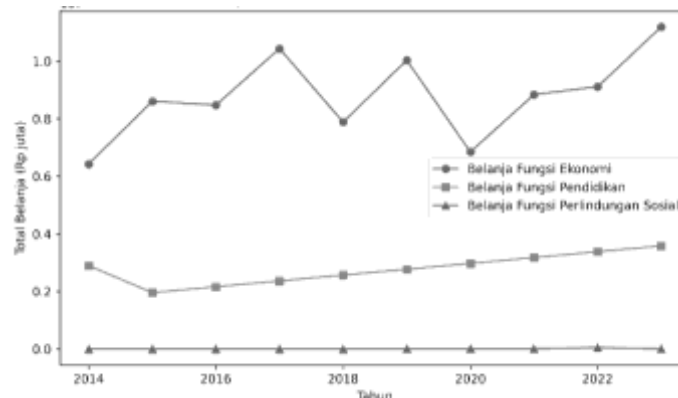
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2014–2023, diolah Penulis

Gambar 1. Perkembangan Rasio Gini Provinsi Kaltim
September 2014-September 2023

Perkembangan ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur selama periode 2014 hingga 2023 menunjukkan pola fluktuatif yang cenderung moderat dengan penurunan perlahan pada akhir periode. Rasio Gini tercatat sebesar 0,361 pada 2014 dan menurun menjadi 0,315 pada 2015, kemudian meningkat bertahap hingga mencapai puncak 0,342 pada 2018 sebelum kembali menurun dan relatif stabil pada kisaran 0,317 sampai 0,335 selama 2019 hingga 2023, serta mencapai 0,322 pada 2023. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika ekonomi daerah yang sangat dipengaruhi dominasi sektor migas dan pertambangan, di mana manfaat pertumbuhan pada periode awal belum tersebar merata akibat karakter sektor padat modal. Penurunan ketimpangan pada 2015 berpotensi terkait peningkatan belanja publik dan program sosial, sementara kenaikan hingga 2018 menunjukkan ketergantungan kuat terhadap komoditas ekstraktif. Meskipun Kalimantan Timur memiliki PDRB per kapita tertinggi di Indonesia, ketimpangan pengeluaran masih relatif moderat dan belum merata antarwilayah, terlihat dari kontribusi pengeluaran kelompok 40% terbawah yang hanya mencapai 22,02% di wilayah perkotaan dan 23,42% di wilayah perdesaan. Kondisi ini menegaskan bahwa pemerataan pendapatan di Kalimantan Timur masih memerlukan penguatan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih inklusif.

Kenaikan pengeluaran per kapita di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh faktor struktural dan kebijakan ekonomi daerah, terutama peningkatan belanja pemerintah pada fungsi ekonomi dan sosial yang mendorong pendapatan rumah tangga melalui pembangunan infrastruktur dan program perlindungan sosial, serta membaiknya harga komoditas tambang dan migas sejak 2019 yang meningkatkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Fluktuasi pada beberapa tahun, seperti penurunan pada 2018 dan 2020, menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang rentan terhadap guncangan harga global dan dampak pandemi. Dalam konteks kesenjangan pembangunan antarwilayah, belanja pemerintah daerah menjadi instrumen fiskal strategis untuk mendorong pemerataan hasil pembangunan melalui pengalokasian anggaran yang lebih terarah. Melalui pembagian belanja dalam kerangka APBD, pemerintah daerah dapat memperkuat basis ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan melindungi kelompok rentan. Kendati demikian, penelitian ini secara khusus membatasi analisis hanya pada tiga fungsi belanja yang

paling relevan dengan isu ketimpangan, yaitu belanja fungsi ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai efektivitas alokasi belanja daerah dalam menekan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur.



Sumber: BPS Provinsi Kaltim, 2014-2023, diolah Penulis

Gambar 2. Tren Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2014-2023

Tren belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2014 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang berbeda pada masing-masing fungsi belanja, mencerminkan perubahan prioritas kebijakan fiskal daerah dan respon terhadap kondisi ekonomi. Belanja fungsi ekonomi cenderung fluktuatif namun meningkat pada akhir periode, dengan penurunan tajam pada 2020 akibat *refocusing* anggaran selama pandemi COVID-19, kemudian kembali meningkat signifikan pada 2022-2023 seiring pemulihan ekonomi dan peningkatan alokasi untuk infrastruktur serta sektor produktif berbasis migas dan industri pengolahan. Belanja fungsi pendidikan menunjukkan tren meningkat dalam jangka panjang meskipun sempat mengalami penurunan pada 2018-2020, yang mencerminkan penyesuaian anggaran selama krisis, sebelum kembali melonjak pascapandemi sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, belanja fungsi perlindungan sosial memperlihatkan pola yang paling fluktuatif dengan lonjakan sangat tinggi pada 2022, yang berkaitan langsung dengan intervensi fiskal untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi pandemi, sebelum menurun kembali pada 2023 seiring normalisasi kebijakan. Perbedaan pola antar fungsi belanja ini menunjukkan bahwa belanja daerah tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga adaptif terhadap tekanan ekonomi dan sosial. Secara keseluruhan, tren tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan belanja daerah Kalimantan Timur diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mempercepat pemulihan pascakrisis, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kajian empiris mengenai hubungan antara belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan menunjukkan hasil yang beragam, sehingga menegaskan pentingnya topik ini untuk terus dikaji secara kontekstual. Kajian Walujadi et al. (2022) menemukan bahwa pada tingkat provinsi di Indonesia, peningkatan

PDRB dan belanja pemerintah justru cenderung memperbesar ketimpangan pendapatan, sementara kualitas pembangunan manusia berperan dalam mereduksinya. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ekspansi fiskal tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan, terutama ketika struktur ekonomi bersifat padat modal dan terpusat. Hasil serupa ditunjukkan oleh Arlantarik & Suseno (2024) pada level kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menemukan bahwa belanja pemerintah dan GRDP per kapita memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Perbedaan hasil antar wilayah ini menguatkan argumen teoretis bahwa efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada arah prioritas belanja dan karakteristik ekonomi daerah.

Sejalan dengan sudut pandang kebijakan distribusi, Rachma et al. (2019) menunjukkan bahwa belanja pemerintah melalui dana desa mampu menurunkan tingkat kemiskinan, namun dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan masih belum konsisten antar wilayah. Sementara itu, Hermawan & Taher (2025) menegaskan relevansi hipotesis Kuznets di Indonesia dengan menunjukkan bahwa fase pembangunan dimanifestasikan atas pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Temuan internasional oleh Zungu (2024) memperkaya diskursus dengan menunjukkan adanya hubungan nonlinier antara belanja pemerintah dan ketimpangan, di mana dampaknya sangat bergantung pada ambang batas pengeluaran terhadap GDP. Sebaliknya, Gnangoin et al. (2019) menekankan bahwa belanja pemerintah sektor sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan, efektif menurunkan ketimpangan di negara berkembang apabila dialokasikan secara tepat dan inklusif.

Berdasarkan justifikasi teoretis dan temuan empiris tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji secara simultan pengaruh belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial serta PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2014–2023. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengayaan bukti empiris di wilayah berbasis sumber daya alam yang memiliki karakteristik ekonomi ekstraktif dan peran strategis nasional. Secara naratif, penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa belanja pemerintah daerah pada fungsi ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial memengaruhi ketimpangan pendapatan, demikian pula PDRB yang dapat memperbesar atau menekan ketimpangan tergantung pada pemerataan pertumbuhan antar wilayah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji hubungan antara belanja pemerintah daerah dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap ketimpangan pendapatan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengujian empiris secara objektif melalui analisis statistik terhadap data yang bersifat numerik dan terstruktur.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,

serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini mencakup sepuluh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan periode pengamatan selama sepuluh tahun, yaitu dari tahun 2014 hingga 2023. Kombinasi dimensi wilayah dan waktu tersebut membentuk data panel yang memungkinkan analisis variasi antar daerah sekaligus perubahan antar periode.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini. Sementara itu, variabel independen meliputi belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta Produk Domestik Regional Bruto kabupaten dan kota. Seluruh variabel dinyatakan dalam bentuk rasio atau transformasi logaritmik guna mengurangi perbedaan skala data serta meningkatkan kestabilan estimasi model.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel untuk mengakomodasi karakteristik data yang bersifat lintas wilayah dan lintas waktu. Pendekatan ini memungkinkan pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan heterogenitas antar kabupaten dan kota. Untuk memperoleh model estimasi yang paling sesuai, proses pemilihan model dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama dilakukan melalui Uji Chow untuk menentukan apakah model *Common Effect* atau *Fixed Effect* lebih tepat digunakan. Selanjutnya, Uji Hausman digunakan untuk membandingkan *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* guna menilai konsistensi dan efisiensi estimasi. Selain itu, Uji Breusch–Pagan Lagrange Multiplier diterapkan untuk menguji keberadaan efek acak dan menentukan kelayakan penggunaan *Random Effect Model* dibandingkan *Common Effect Model* (Sekaran & Bougie, 2017; Sholihin & Ghaniy, 2021; Siregar, 2013).

Setelah model regresi terpilih, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan validitas estimasi. Uji multikolinearitas digunakan untuk menilai ada tidaknya korelasi tinggi antar variabel independen dengan menggunakan *Variance Inflation Factor*. Sementara itu, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memeriksa kestabilan varians residual pada model regresi. Model regresi dinyatakan layak apabila tidak ditemukan pelanggaran terhadap asumsi-asumsi tersebut.

Seluruh proses estimasi dan pengujian statistik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak STATA versi 19.5. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil estimasi yang diperoleh mampu memberikan gambaran empiris yang akurat mengenai pengaruh belanja pemerintah daerah dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tahap awal analisis regresi data panel difokuskan pada penentuan model estimasi yang paling sesuai dengan karakteristik data yang digunakan. Mengingat data memiliki dimensi lintas kabupaten dan/ kota serta rentang waktu pengamatan yang cukup

panjang, diperlukan pengujian untuk memastikan apakah perbedaan karakteristik antar wilayah bersifat tetap atau acak. Oleh karena itu, proses pemilihan model dilakukan secara bertahap dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Breusch–Pagan Lagrange Multiplier sebagai dasar penentuan model regresi yang paling tepat.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Pemilihan Model	Statistik Uji	Nilai	Keputusan
Uji Chow	F-statistic	49.33	FEM lebih tepat dibandingkan CEM
	Prob > F	0.0000	Signifikan
Uji Hausman	Chi-square	5.26	REM lebih tepat digunakan
	Prob > chi ²	0.1538	Tidak signifikan
Uji Breusch Pagan LM	Chi-bar ²	310.38	REM lebih tepat digunakan
	Prob > chibar ²	0.0000	Signifikan

Sumber : *Output STATA Ver. 19.5 tahun 2025*, diolah Penulis

Hasil pengujian Chow menunjukkan nilai *F-statistic* sebesar 49,33 dengan tingkat probabilitas 0,0000, yang berada jauh di bawah batas signifikansi 5%. Temuan ini mengindikasikan bahwa model dengan asumsi intercept yang sama antar kabupaten dan kota tidak dapat digunakan. Dengan demikian, terdapat perbedaan karakteristik dasar antar wilayah yang secara statistik memengaruhi hubungan antara belanja pemerintah, PDRB, dan ketimpangan pendapatan. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Timur, kondisi ini mencerminkan adanya variasi struktur ekonomi antar daerah, seperti dominasi sektor migas dan industri ekstraktif di Bontang dan Kutai Kartanegara dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki basis ekonomi berbeda. Oleh karena itu, pendekatan model yang mampu mengakomodasi perbedaan karakteristik antar wilayah, yaitu *Fixed Effect Model*, dinilai lebih sesuai dibandingkan *Common Effect Model*.

Tahap selanjutnya dilakukan melalui Uji Hausman untuk menentukan pilihan antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Hasil pengujian menunjukkan nilai Chi-square sebesar 5,26 dengan probabilitas 0,1538, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya korelasi antara efek individual kabupaten dan kota dengan variabel independen dalam model. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik antar wilayah tidak bersifat sistematis terhadap belanja pemerintah maupun PDRB, sehingga penggunaan *Random Effect Model* lebih efisien dibandingkan *Fixed Effect Model*.

Untuk memperkuat hasil pemilihan model, dilakukan Uji Breusch–Pagan Lagrange Multiplier guna membandingkan kelayakan antara *Random Effect Model* dan *Common Effect Model*. Hasil pengujian menunjukkan nilai Chi-bar squared sebesar 310,38 dengan tingkat probabilitas 0,0000, yang berada jauh di bawah batas signifikansi 5%. Temuan ini mengonfirmasi bahwa variasi efek individual antar kabupaten dan kota bersifat signifikan dan tidak dapat diabaikan. Dalam konteks penelitian ini, hasil tersebut mencerminkan adanya perbedaan kondisi ekonomi dan fiskal antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, seperti variasi kapasitas fiskal, tingkat urbanisasi, dan struktur sektor ekonomi.

Berdasarkan rangkaian hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Breusch–Pagan Lagrange Multiplier, *Random Effect Model* ditetapkan sebagai model regresi data panel yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan model tersebut didukung oleh karakteristik data yang menunjukkan adanya variasi antar wilayah yang bersifat acak serta tidak berkorelasi secara langsung dengan variabel independen. Dengan demikian, penggunaan *Random Effect Model* dinilai mampu memberikan estimasi yang lebih efisien dan representatif dalam menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat kelayakan statistik sehingga hasil estimasi dapat diinterpretasikan secara andal. Pengujian ini penting karena pelanggaran terhadap asumsi dasar regresi dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi bias dan tidak efisien. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik difokuskan pada uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas karena kedua asumsi tersebut paling relevan dengan karakteristik data panel kabupaten dan/ kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Indikator	Nilai	Keputusan
Uji Multikolinearitas	VIF tertinggi	1.37	Tidak terjadi multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas	Prob > χ^2	0.7247	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber : *Output STATA Ver. 19.5 tahun 2025*, diolah Penulis

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang relatif rendah dengan nilai tertinggi sebesar 1.37. Nilai tersebut jauh di bawah batas kritis yang umum digunakan dalam analisis regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linier yang kuat antar variabel independen. Dalam konteks penelitian ini, temuan tersebut menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada fungsi ekonomi, pendidikan, perlindungan sosial, serta PDRB memiliki variasi yang berbeda dan tidak bergerak secara bersamaan secara berlebihan, sehingga masing masing variabel dapat menjelaskan ketimpangan pendapatan secara independen.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.7247 yang berada di atas tingkat signifikansi 5%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa hasil pengujian tidak signifikan secara statistik, sehingga varians residual dapat dianggap bersifat konstan pada seluruh observasi. Dengan demikian, model regresi panel yang digunakan tidak mengandung heteroskedastisitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebaran *error* dalam data panel kabupaten dan/ kota di Provinsi Kalimantan Timur relatif stabil meskipun terdapat perbedaan karakteristik wilayah dan periode waktu pengamatan.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, dapat disimpulkan bahwa model regresi panel yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi

asumsi dasar regresi yang diperlukan. Tidak ditemukannya multikolinearitas menunjukkan bahwa struktur belanja daerah dan PDRB antar kabupaten dan/ kota memiliki variasi yang memadai untuk dianalisis secara bersamaan. Sementara itu, varian residual yang bersifat konstan mencerminkan kestabilan hubungan antara variabel penelitian selama periode pengamatan. Dengan karakteristik wilayah Kalimantan Timur yang memiliki perbedaan struktur ekonomi namun berada dalam kerangka kebijakan fiskal yang relatif seragam, pemenuhan asumsi klasik ini memperkuat kelayakan penggunaan model REM dalam menganalisis pengaruh belanja pemerintah dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan.

Uji Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel dilakukan untuk mengkaji pengaruh belanja pemerintah daerah pada fungsi ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta Produk Domestik Regional Bruto terhadap ketimpangan pendapatan di sepuluh kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2014–2023. Pengujian dilakukan melalui uji parsial menggunakan uji t, uji simultan melalui uji F, serta analisis koefisien determinasi untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan antarwilayah.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Regresi Data Panel dan Pengujian Hipotesis

Jenis Pengujian	Variabel	Nilai	Keputusan
Uji t (Parsial)	Belanja Ekonomi	Koefisien -0.9612 p-value 0.000	Signifikan negatif
	Belanja Pendidikan	Koefisien 0.5189 p-value 0.000	Signifikan positif
	Belanja Perlindungan Sosial	Koefisien 0.8484 p-value 0.000	Signifikan positif
	lnPDRB	Koefisien 0.0000447 p-value 0.063	Signifikan pada taraf 10%
Uji F (Simultan)	Wald <i>chi square</i> Probabilitas	184.08 0.0000	Signifikan Variabel berpengaruh simultan
Koefisien Determinasi	R <i>squared overall</i>	0.8775	Mampu menjelaskan 87,75% variasi ketimpangan pendapatan

Sumber : *Output STATA Ver. 19.5 tahun 2025*, diolah Penulis

Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada fungsi ekonomi memiliki koefisien bernilai negatif sebesar -0.9612 dengan tingkat probabilitas 0.000, yang mengindikasikan pengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, belanja pendidikan dan belanja perlindungan sosial masing-masing memiliki koefisien positif sebesar 0.5189 dan 0.8484 dengan probabilitas 0.000, yang menunjukkan bahwa peningkatan alokasi pada kedua fungsi tersebut berkorelasi dengan peningkatan ketimpangan pendapatan. Variabel lnPDRB memiliki nilai probabilitas 0.063 sehingga signifikan pada taraf 10%, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek.

Hasil uji simultan menunjukkan nilai Wald *chi square* sebesar 184.08 dengan probabilitas 0.0000, yang berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa variasi Indeks Gini tidak dapat dijelaskan oleh satu variabel secara terpisah, melainkan merupakan hasil interaksi antara kebijakan belanja pemerintah dan kinerja ekonomi daerah. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik Kalimantan Timur yang memiliki perbedaan kapasitas fiskal dan basis ekonomi antar wilayah, sehingga kombinasi variabel fiskal dan ekonomi menjadi faktor penentu utama dalam dinamika ketimpangan pendapatan.

Nilai *R squared overall* sebesar 0.8775 menunjukkan bahwa model regresi data panel yang digunakan mampu menjelaskan 87,75% variasi ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan/ kota di Provinsi Kalimantan Timur. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah dan PDRB memiliki peran yang dominan dalam membentuk pola distribusi pendapatan. Sementara itu sisa variasi ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji parsial uji simultan dan koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria kelayakan analisis dan memiliki daya jelaskan yang kuat. Pemilihan model REM didukung oleh karakteristik data kabupaten dan/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki perbedaan kondisi ekonomi dan fiskal antar wilayah namun berada dalam kerangka kebijakan belanja daerah yang relatif seragam. Dengan kondisi tersebut model REM mampu menangkap variasi antar daerah secara efisien sehingga hasil regresi yang diperoleh relevan untuk menjelaskan pengaruh belanja pemerintah dan PDRB terhadap ketimpangan.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini menguraikan pengaruh belanja daerah menurut fungsi dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan/ kota di Provinsi Kalimantan Timur. Penjelasan difokuskan pada arah dan signifikansi koefisien yang diperoleh, serta dikaitkan dengan teori ekonomi dan temuan penelitian terdahulu untuk memberikan penjelasan atas pola hubungan yang terjadi.

Belanja Daerah Fungsi Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa belanja daerah fungsi ekonomi memiliki koefisien sebesar -0.9612 dengan nilai *p* sebesar 0.000, sehingga berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja pemerintah pada fungsi ekonomi secara statistik mampu menurunkan nilai Indeks Gini. Hubungan negatif tersebut mencerminkan peran belanja ekonomi dalam memperluas akses infrastruktur dan aktivitas produktif di wilayah yang relatif tertinggal, sehingga kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat menjadi lebih merata antar kabupaten dan kota. Hasil ini konsisten dengan hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung menurun ketika manfaat pembangunan mulai terdistribusi secara lebih luas (Kuznets, 1955). Dalam kerangka teori pertumbuhan klasik, Adam Smith menekankan bahwa investasi produktif dan pembagian kerja mendorong peningkatan produktivitas

dan output, yang pada akhirnya berkontribusi pada pemerataan pendapatan apabila akses ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu (Sukirno, 2016). Selain itu, teori *Dual Sector Model* menjelaskan bahwa belanja ekonomi yang diarahkan pada sektor produktif mampu mempercepat perpindahan tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas tinggi, sehingga ketimpangan pendapatan dapat ditekan melalui peningkatan kesempatan kerja di wilayah non-perkotaan (Arsyad, 2010; Todaro & Smith, 2015).

Secara empiris, temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai kajian terdahulu yang menegaskan bahwa belanja pemerintah pada fungsi ekonomi memiliki dampak pemerataan yang lebih kuat dibandingkan belanja bersifat konsumtif. Menurut Walujadi et al. (2022) serta Arlantarik & Suseno (2024) menunjukkan bahwa belanja ekonomi daerah di Indonesia berperan signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan ketika dialokasikan secara relatif merata antarwilayah. Studi internasional oleh Zungu (2024) juga menegaskan bahwa belanja pemerintah pada sektor produktif mampu menekan ketimpangan pendapatan di wilayah berkembang melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konektivitas ekonomi. Temuan ini diperkuat oleh kajian internal GESDR yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung belanja produktif memiliki potensi pemerataan yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan yang didorong sektor padat modal (Octavia et al., 2024). Selain itu, kajian JEB menegaskan bahwa kerangka kebijakan fiskal yang relatif seragam di Indonesia membuat belanja ekonomi menjadi instrumen penting dalam mengurangi disparitas antar daerah (Rizal et al., 2023). Dengan mempertimbangkan karakteristik Kalimantan Timur yang memiliki perbedaan struktur ekonomi antar kabupaten dan kota, hasil penelitian ini menegaskan bahwa belanja daerah fungsi ekonomi telah berperan efektif sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam menurunkan ketimpangan pendapatan dan mendorong pembangunan wilayah yang lebih inklusif.

Belanja Daerah Fungsi Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pengaruh belanja pendidikan berdasarkan hasil uji t memiliki koefisien sebesar 0.5189 dengan nilai p sebesar 0.000, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja pendidikan berkorelasi dengan kenaikan Indeks Gini dalam jangka pendek. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa manfaat belanja pendidikan belum terdistribusi secara merata antar kabupaten dan kota. Temuan ini dapat dijelaskan melalui hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, peningkatan investasi publik termasuk pada sektor pendidikan cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan karena hanya sebagian wilayah dan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal (Kuznets, 1955). Pandangan ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik yang menekankan bahwa akumulasi modal dan peningkatan produktivitas akan lebih cepat dinikmati oleh wilayah dengan struktur ekonomi dan pasar tenaga kerja yang telah berkembang (Sukirno, 2016). Selain itu, teori *Dual Sector Model* menjelaskan bahwa apabila sektor modern lebih terkonsentrasi di wilayah tertentu, maka hasil pembangunan termasuk belanja pendidikan akan terakumulasi di wilayah tersebut dan memperlebar ketimpangan antarwilayah (Todaro & Smith, 2015; Arsyad, 2010).

Secara empiris, temuan Walujadi et al. (2022), (Rachma et al., 2019), serta Arlantarik & Suseno (2024) konsisten dengan penelitian ini, bahwa belanja pendidikan dan belanja publik lainnya berpotensi meningkatkan ketimpangan apabila distribusinya tidak merata dan tidak diiringi pemerataan akses. Kajian internal GESDR juga menunjukkan bahwa belanja pendidikan daerah memiliki dampak redistributif yang terbatas dalam jangka pendek dan sangat bergantung pada efektivitas serta pemerataan implementasi kebijakan (Rizal et al., 2022). Sementara itu, studi JEB menegaskan bahwa keseragaman kerangka kebijakan fiskal nasional belum tentu menjamin pemerataan manfaat belanja pendidikan antar daerah (Hamzah et al., 2017). Dengan mempertimbangkan karakteristik Kalimantan Timur yang memiliki perbedaan kapasitas ekonomi dan kualitas infrastruktur pendidikan antarwilayah, hasil penelitian ini menegaskan bahwa belanja pendidikan masih berperan sebagai faktor diferensiasi pendapatan dalam jangka pendek sebelum berfungsi sebagai instrumen pemerataan dalam jangka panjang.

Belanja Daerah Fungsi Perlindungan Sosial terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pengaruh belanja perlindungan sosial berdasarkan hasil uji t memiliki koefisien sebesar 0.8484 dengan nilai p sebesar 0.000, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja sosial justru berkorelasi dengan kenaikan Indeks Gini dalam jangka pendek. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa belanja perlindungan sosial belum berfungsi efektif sebagai instrumen pemerataan pendapatan. Temuan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan Keynesian yang menyatakan bahwa belanja pemerintah, termasuk belanja perlindungan sosial, berperan meningkatkan konsumsi masyarakat melalui dorongan permintaan agregat, namun tidak secara langsung menciptakan produktivitas baru apabila bersifat konsumtif dan jangka pendek (Keynes, 1936; Sukirno, 2016). Dalam konteks ini, belanja sosial lebih berfungsi sebagai penyangga konsumsi dibandingkan sebagai pendorong pemerataan struktural. Selain itu, hipotesis Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, kebijakan redistributif dapat meningkatkan ketimpangan apabila distribusinya tidak merata antarwilayah (Kuznets, 1955).

Temuan empiris penelitian ini sejalan dengan hasil Rachma et al. (2019) dan Walujadi et al. (2022) yang menunjukkan bahwa belanja sosial efektif menurunkan kemiskinan, tetapi dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan sangat bergantung pada pemerataan distribusi dan ketepatan sasaran. Studi Gnangoin et al. (2019) juga menegaskan bahwa belanja sosial baru berperan menurunkan ketimpangan apabila menjangkau kelompok dan wilayah berpendapatan rendah secara inklusif. Dengan mempertimbangkan karakteristik Kalimantan Timur yang memiliki disparitas antarwilayah serta perbedaan kapasitas administrasi daerah, hasil penelitian ini menegaskan bahwa belanja perlindungan sosial masih berperan sebagai instrumen jangka pendek yang belum mampu menekan ketimpangan pendapatan secara berkelanjutan.

PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan

lnPDRB memiliki nilai p sebesar 0,063, sehingga signifikan pada taraf signifikansi 10%, meskipun belum memenuhi kriteria signifikansi pada taraf yang lebih ketat seperti 5%. Koefisien lnPDRB yang bernilai positif mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan antar kabupaten

dan/ kota di Provinsi Kalimantan Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata antarwilayah. Secara deskriptif, terdapat variasi PDRB yang sangat besar antar kabupaten dan kota, di mana wilayah dengan dominasi sektor migas dan pertambangan seperti Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki PDRB jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah seperti Mahakam Ulu. Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi kriteria kelayakan statistik, sehingga hubungan positif antara PDRB dan ketimpangan pendapatan mencerminkan kondisi empiris yang nyata dan bukan disebabkan oleh bias model.

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan hipotesis Kuznets yang menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan karena manfaat pertumbuhan lebih dahulu dinikmati oleh kelompok dan wilayah tertentu (Kuznets, 1955). Teori pertumbuhan ekonomi juga menegaskan bahwa peningkatan output tidak secara otomatis menjamin pemerataan pendapatan apabila distribusi faktor produksi dan akses terhadap peluang ekonomi tidak merata (Mankiw, 2003). Selain itu, *Dual Sector Model* menjelaskan bahwa dominasi sektor modern berproduktivitas tinggi yang bersifat padat modal dapat menyebabkan konsentrasi pendapatan pada wilayah tertentu apabila keuntungan sektor tersebut tidak mengalir ke sektor tradisional (Todaro & Smith, 2015; Arsyad, 2010).

Temuan empiris penelitian ini konsisten dengan hasil Walujadi et al. (2022), Arlantarik dan Suseno (2024), serta Zungu (2024) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sering kali berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan ketika struktur ekonomi daerah tidak bersifat inklusif. Sejalan dengan itu, Fitriyah & Prabowo (2021) dalam *Independent: Journal of Economics* menunjukkan bahwa dominasi sektor unggulan daerah dapat memperlebar ketimpangan pendapatan antarwilayah. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Shobary & Afiatno (2025) serta Ardiani & Prabowo (2024), yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan produktivitas belum tentu bersifat inklusif apabila peningkatan *output* lebih banyak dinikmati oleh wilayah dengan struktur ekonomi yang lebih maju. Dengan mempertimbangkan karakteristik Kalimantan Timur yang bergantung pada sektor ekstraktif, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pertumbuhan PDRB belum sepenuhnya bersifat inklusif dan masih berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan antarwilayah.

Belanja Pemerintah dan PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil uji simultan, belanja ekonomi, belanja pendidikan, belanja perlindungan sosial, dan lnPDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di sepuluh kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur periode 2014–2023, yang ditunjukkan oleh nilai $\text{Prob} > F$ dan $\text{Prob} > \chi^2$ sebesar 0,0000 pada tingkat signifikansi 5%. Nilai R^2 *overall* sebesar 0,8775 mengindikasikan bahwa 87,75% variasi ketimpangan pendapatan mampu dijelaskan oleh kombinasi variabel fiskal dan PDRB, serta didukung oleh tidak ditemukannya pelanggaran asumsi klasik sehingga hasil estimasi dapat dianggap valid dan reliabel. Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan hipotesis Kuznets dan teori *dual sector* Lewis yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ekspansi belanja publik tidak secara otomatis menurunkan ketimpangan apabila manfaat pembangunan terkonsentrasi pada sektor

modern dan wilayah tertentu, sebagaimana terlihat pada dominasi sektor migas dan pertambangan di beberapa daerah ber-PDRB tinggi di Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Walujadi et al. (2022) serta Arlantarik dan Suseno (2024) yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga menegaskan bahwa struktur fiskal daerah dan pola pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam menentukan tingkat pemerataan pendapatan antar kabupaten dan kota.

Secara spasial, ketimpangan tersebut juga dapat dijelaskan melalui pola konsentrasi aktivitas ekonomi antarwilayah. Kajian Vansyah & Prabowo (2022) menunjukkan bahwa konsentrasi spasial industri yang tidak diimbangi dengan difusi aktivitas ekonomi ke wilayah lain berpotensi menghambat konvergensi pembangunan. Dalam konteks Kalimantan Timur, dominasi sektor pertambangan dan migas di wilayah tertentu menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi terakumulasi secara lokal, sehingga ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota tetap bertahan meskipun kinerja ekonomi daerah secara agregat meningkat.

Refleksi terhadap dinamika ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan variasi pengalaman antar kabupaten dan kota yang cukup signifikan. Beberapa wilayah seperti Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Bontang memiliki basis ekonomi yang kuat, didukung oleh sektor migas, pertambangan, dan jasa, sehingga mampu menarik investasi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah tertentu. Sebaliknya, kabupaten seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser masih menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar, dan basis ekonomi yang relatif tradisional. Perbedaan tersebut menciptakan pola ketimpangan yang tidak homogen, di mana manfaat pertumbuhan dan alokasi belanja daerah cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang sudah lebih unggul. Oleh karena itu, refleksi empiris lintas daerah ini menegaskan bahwa pendekatan kebijakan fiskal yang bersifat seragam tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan, melainkan harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik setiap kabupaten dan kota.

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam perencanaan dan pengelolaan kebijakan fiskal daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Sejalan dengan arah misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025–2029 berdasarkan Perda No 11 tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045 dan telah diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN yang menekankan pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan merata antarwilayah. Temuan bahwa belanja daerah fungsi ekonomi berpengaruh signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa program pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah, dan penguatan aktivitas ekonomi lokal perlu terus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam kerangka APBD, alokasi belanja ekonomi perlu diarahkan secara lebih proporsional ke kabupaten dan kota yang relatif tertinggal agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah dengan basis ekonomi kuat, tetapi juga mampu mendorong pemerataan pendapatan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Di sisi lain, temuan bahwa belanja pendidikan, belanja perlindungan sosial, dan pertumbuhan PDRB cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek menunjukkan perlunya penajaman strategi kebijakan dalam RPJMD dan

APBD. Belanja pendidikan dan perlindungan sosial perlu difokuskan pada pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan di daerah tertinggal, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, strategi pertumbuhan ekonomi daerah perlu diarahkan pada diversifikasi struktur ekonomi dan penguatan sektor non-ekstraktif yang lebih padat karya agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih luas. Dengan perencanaan fiskal yang lebih terarah dan berbasis bukti empiris, kebijakan pembangunan daerah di Kalimantan Timur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menurunkan ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan/kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja daerah menurut fungsi dan kinerja ekonomi daerah memiliki pengaruh yang berbeda terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur. Belanja daerah fungsi ekonomi terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan bahwa alokasi belanja pada sektor produktif mampu mendorong pemerataan pendapatan antarwilayah. Sebaliknya, belanja pendidikan dan belanja perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek, yang mengindikasikan bahwa manfaat kedua jenis belanja tersebut belum terdistribusi secara merata dan masih terkonsentrasi pada wilayah dengan kapasitas ekonomi dan kelembagaan yang lebih baik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan pada taraf signifikansi 10%, yang menunjukkan bahwa peningkatan *output* ekonomi belum sepenuhnya bersifat inklusif. Kombinasi belanja pemerintah daerah dan PDRB mampu menjelaskan sebesar 87,75% variasi ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga memiliki peran krusial dalam membentuk pola distribusi pendapatan regional. Temuan ini secara keseluruhan menjawab tujuan penelitian dan mendukung hipotesis bahwa struktur belanja daerah dan pola pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam membentuk ketimpangan pendapatan regional di Kalimantan Timur.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa keterbatasan dan peluang pengembangan penelitian lanjutan. Pertama, penelitian ini masih terbatas pada penggunaan variabel belanja daerah dan PDRB sehingga belum sepenuhnya menangkap faktor lain yang berpotensi memengaruhi ketimpangan pendapatan, seperti kualitas institusi, tingkat urbanisasi, dan struktur pasar tenaga kerja. Kedua, periode pengamatan yang digunakan belum memungkinkan untuk mengamati dampak jangka panjang belanja pendidikan dan perlindungan sosial terhadap pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan dengan memasukkan variabel institusional dan sosial ekonomi yang lebih beragam serta memperpanjang waktu pengamatan untuk menangkap efek dinamis kebijakan fiskal daerah. Selain itu, penggunaan pendekatan non-linier atau metode spasial juga dapat menjadi alternatif untuk memahami pola ketimpangan antarwilayah secara lebih mendalam dan komprehensif.

REFERENSI

- Ardiani, D. R., & Prabowo, P. S. (2024). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan. *Independent: Journal of Economics*, 4(2). <https://doi.org/10.26740/independent.v4i2.63277>
- Arlantarik, I. M., & Suseno, D. A. (2024). The Effect of Government Expenditure and GRDP Per Capita on Income Inequality. *EFFICIENT Indonesian Journal of Development Economics*, 7(1), 19–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/fjxrjc46>
- Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima. *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*.
- Fitriyah, L., & Prabowo, P. S. (2021). Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2019. *Independent: Journal of Economics*, 1(2). <https://doi.org/10.26740/independent.v1n2.p206-217>
- Gnangoin, Y. T. B., Du, L., Assamoi, G. R., Edjoukou, A. J. R., & Kassi, D. F. (2019). Public spending, income inequality and economic growth in Asian countries: A panel GMM approach. *Economies*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/economies7040115>
- Hamzah, F., Rosyadi, R., & Kartika, M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Gender Gap dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2). <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i2.22985>
- Hasan, M. (2022). Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Hermawan, A. U., & Taher, A. R. Y. (2025). Analisis Relevansi Hipotesis Kuznet Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Periode 2004-2023 . *E-Journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)* , 3(3), 577–590. <https://doi.org/10.23960/efebe.v3i3.263>
- Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Output, Interest and Money. In *The Collected Writings of John Maynard Keynes: Vol. V*.
- Kuznets, S. (1955). The American Economic Review Volume XLV March, 1955 Number One Economic Growth And Income Inequality*. *American Economic Association*, 45(1).
- Mankiw, N. G. (2012). Principles of Economics 6th Edition. *USA: Cengage Learning*.
- Muhammad Rizal, Nazer, M., & Sari, D. T. (2023). Analisis Efisiensi Belanja Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Tertinggal di Indonesia. *Ekonomi Dan*

- Bisnis: Berkala Publikasi Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, Dan Terapan Teori*, 27(2). <https://doi.org/10.24123/jeb.v27i2.5957>
- Octavia, E. C., Firmansyah, A. A., Fatmala, R. D., Aisa, S. N., Ma'ruf, A., & Hamzah, A. F. (2024). The Nexus of Economic Growth, Human Development Index, and Unemployment to Income Inequality in East Java. *Global Economic, Social, and Development Review*, 28(2). <https://doi.org/10.24123/gesdr.v28i2.7002>
- Rachma, D. D., Somaji, R. P., & Kustono, A. S. (2019). Government expenditure, poverty and income inequality in Indonesia: New evidence from village funds. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8).
- Sadono Sukirno. (2016). Teori Pengantar Makroekonomi. *Jakarta : Rajawali Press*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian Bisnis Edisi 6 Buku 2. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Shobary, R., & Afiatno, B. E. (2025). Pengaruh Pengangguran, Produktivitas, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 5(2), 161–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/independent.v5i2.73023>
- Sholihin, M., & Ghaniy, P. (2021). Analisis Data Penelitian Menggunakan Software STATA. In *Google Books* (Edisi 1). ANDI Publisher.
- Siregar, S. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS /Syofian Siregar. In *Jakarta Kencana Prenada Media Group*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Pembangunan Ekonomi (Jilid 1) (Edisi 11). In *Edisi Kesembilan terjemahan oleh Haris Munandar dan Puji AL Jakarta: Erlangga*.
- Vansyah, L. R. R., & Prabowo, P. S. (2022). Pola Konsentrasi Spasial Industri Jawa Tengah Menuju Konvergensi Pembangunan. *Independent: Journal of Economics*, 2(3), 64–73. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i3.51310>
- Walujadi, D., Indupurnahayu, I., & Endri, E. (2022). Determinants of Income Inequality Among Provinces: Panel Data Evidence from Indonesia. *Quality - Access to Success*, 23(190). <https://doi.org/10.47750/QAS/23.190.26>
- World Bank. (2015). *Indonesia's Rising Divide : Why Inequality is Rising, Why it Matters and What Can Be Done* (1; 2015).
- Yusuf, A. A., Sumner, A., & Rum, I. A. (2014). Twenty Years of Expenditure Inequality in Indonesia, 1993-2013. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2). <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.939937>
- Zungu, L. T. (2024). The nonlinear dynamic effect of government expenditure on income inequality: The case of macroprudential policy switching. *Journal of*

Infrastructure, Policy and Development, 8(4), 2515.
<https://doi.org/10.24294/jipd.v8i4.2515>